

### **BAB 3**

## **GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA**

Surakarta sebagai salah satu kota di Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang pertumbuhannya sangat pesat, mengalami perkembangan di seluruh bidang kegiatan. Baik dalam bidang industri, jasa, permukiman, pendidikan, perdagangan maupun transportasi. Seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan tersebut, maka terjadi alih fungsi lahan yang tadinya merupakan lahan pertanian yang tidak terbangun menjadi daerah terbangun (*built up area*). Perubahan ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan permukiman.

Perluasan lahan terbangun baik difungsikan sebagai permukiman, perdagangan maupun industri secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan tersebut sering terjadi di wilayah perkotaan pada umumnya. Masalah banjir, sampah, polusi udara, pencemaran air, penurunan kualitas dan kuantitas air tanah merupakan masalah pelik yang sering terjadi di wilayah perkotaan, sehingga masalah-masalah tersebut perlu segera ditanggulangi secara terencana dan terpadu.

Sejak diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Surakarta, maka Pemerintah Kota Surakarta kemudian menetapkan suatu peraturan daerah yaitu Perda No. 2 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Dengan ditetapkannya perda tersebut diharapkan agar pengendalian lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan secara komprehensif, taat azas dan terpadu.

Inti yang penting di dalam pengendalian lingkungan hidup tersebut adalah adanya upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengawasan dan pemeliharaan.

Pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Surakarta. Oleh sebab itu perlu diupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan antara pembangunan sektoral dan daerah.

### **3.1 Keadaan Umum**

Kota Surakarta merupakan salah satu pemerintah daerah tingkat II yang ada di Jawa Tengah. Kota Surakarta di bagian selatan dibatasi oleh Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. Bagian timur dibatasi oleh Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Bagian utara dibatasi oleh Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar dan sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Karanganyar.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah dengan luas area sebesar 4.404,06 Ha yang terdiri dari lima kecamatan dengan luasan setiap kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Laweyan terdiri dari 11 kelurahan dengan luas 863,83 Ha (19,62%)
- Kecamatan Serengan terdiri dari 7 kelurahan dengan luas 319,5 Ha (7,25%)
- Kecamatan Pasarkliwon terdiri dari 9 kelurahan dengan luas 481,52 Ha (28,57%)
- Kecamatan Jebres terdiri dari 11 kelurahan dengan luas 1.258,18 Ha (28,57%)
- Kecamatan Banjarsari terdiri dari 13 kelurahan dengan luas 1.481,1 Ha (33,63%)

Pada tahun 2009 dari total luas area Kota Surakarta terbagi menjadi lahan sawah teririgasi 18,94 Ha (0,43%), sawah tadah hujan seluas 126,52 Ha (2,87%) dan luas ladang (tegalan) seluas 84,73 Ha (1,92%). Kota Surakarta sebagian besar brupa tanah kering dengan penggunaan sebagian besar adalah lahan pemukiman

seluas 2.715,61 Ha (61,66%), lahan untuk usaha lain sebesar 399,44 Ha (9,07%) dan untuk lahan industri sebesar 101,42 Ha (2,3%).

**Tabel 3.1.1**  
**Perkembangan Tata Guna Lahan Tahun 2005-2009 (dalam Ha)**

No.	Tata Guna Lahan	2005	2006	2007	2008	2009
<b>a. Lahan Persawahan</b>						
	1. Sawah Teririgasi	29,97	22,46	20,06	19,01	18,94
	2. Sawah Tadah Hujan	136,27	132,33	129,26	127,16	126,52
<b>b. Lahan Kering</b>						
	1. Ladang (tegalan)	91,85	89,83	89,73	86,42	84,73
	2. Pemukiman	2.689,51	2.689,51	2.706,75	2.713,21	2.715,61
	3. Usaha lain	440,40	440,40	169,60	399,44	399,44
	4. Belum/Tidak Diusahakan	44,04	-	-	-	-
<b>c. Lahan Industri (Kawasan Industri)</b>		101,42	101,42	101,42	101,42	101,42
<b>d. Lahan Pemukiman/Perkampungan</b>		2.730,48	2.730,48	2.722,85	2.716,59	2.716,59
<b>e. Tanah Tandus/Tanah Rusak (tidak diusahakan)</b>		2.689,51	2.689,51	2.706,75	2.713,21	2.715,61

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

Meskipun demikian secara periodik telah terjadi alih fungsi dari lahan sawah menjadi lahan bukan sawah yang ditunjukkan dengan luas sawah irigasi pada tahun 2005 seluas 29,97 ha dan tanah sawah nonirigasi seluas 136,27 Ha berubah fungsi sehingga pada tahun 2009 tinggal 18,94 Ha untuk lahan sawah irigasi dan 126,52 Ha sawah nonirigasi. Hal ini diduga disebabkan karena desakan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga kebutuhan akan tempat tinggal, fasilitas umum maupun sarana kerja yang terkait dengan penggunaan lahan di luar sektor pertanian.

Luas lahan kelima kecamatan, sebagian besar sebagian besar bahkan lebih dari separuh lahannya digunakan untuk lahan perumahan. Untuk Kecamatan Jebres lahan untuk Jasa 14% merupakan lahan untuk jasa dimana lahan ini digunakan untuk Perguruan Tinggi UNS, STSI, *Solo Techno Park* dan Terminal Peti Kemas. Pada kecamatan ini juga masih terdapat tanah tegalan 6,5% di Kelurahan Mojosongo, berupa perkebunan rakyat yang banyak diusahakan untuk kayu jati

**Tabel 3.1.2**  
**Peta Tata Guna Lahan Pada Tiap Kecamatan Tahun 2009 (dalam %)**

Kecamatan	Luas	Jasa	Persh	Industri	Tnh Ksg	Tegal an	Sawah	Permh n	Kubur An	Lap Or	Taman	Lain
Laweyan	872,5	10,3	4,9	4,6	0,8	-	4,7	65,3	0,7	1,4	0,0	7,3
Serengan	322,6	5,4	9,4	1,9	0,8	-	-	65,9	0,4	0,8	-	15,3
Pasarkliwon	486,3	7,8	8,3	2,0	3,4	-	0,7	64,2	0,3	2,0	-	11,3
Jebres	1.270,8	14,0	6,9	2,0	1,3	6,5	1,7	53,5	3,1	0,8	1,8	8,3
Banjarsari	1.495,9	7,2	6,0	1,4	0,7	0,0	5,4	66,2	1,7	2,0	0,6	8,7

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

Perubahan fungsi lahan menjadi suatu kawasan terbangun memberi dampak terhadap lingkungan hidup dan tata ruang bangunan, sehingga untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayah Kota Surakarta, Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pemantauan terhadap baku mutu lingkungan antara lain untuk kualitas air limbah sebagai dampak pembangunan yang dilaksanakan. Pemantauan ini dilaksanakan di 22 lokasi yang menghasilkan data base air sungai dan air minum di sekitar wilayah Surakarta. Namun terdapat kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemantauan baku mutu lingkungan ini yaitu keterbatasan biaya untuk pemeliharaan alat-alat laboratorium yang digunakan untuk pengujian sampel kualitas air.

Selain itu dengan berkembangnya pembangunan di wilayah Kota Surakarta, pemerintah juga melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian hidupnya khususnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kelengkapan perijinan seperti AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan-Upaya Kelola Lingkungan) untuk pembangunan usaha serta produksi bersih.

### **3.2 Ketenagakerjaan**

Kota Surakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki struktur tenaga kerja yang hampir sama, yaitu didominasi oleh sektor industri, sektor bangunan, sektor jasa dan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian. Jika dilakukan pengamatan empiris 4 tahunan, struktur pekerjaan didominasi oleh sektor industri sebesar 49,5%. Dari tabel perkembangan tenaga

kerja berikut ini terlihat sektor industri relatif stabil meskipun terjadi sedikit penurunan tenaga kerja akibat adanya krisis global yang mempengaruhi sektor industri.

**Tabel 3.2**  
**Banyak Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2005-2008**

Tahun	Petani dan Buruh Tani	Pengusaha (jasa)	Buruh Industri	Buruh Bangunan
2005	1.055	8.042	70.254	64.406
2006	1.055	8.218	75.667	68.535
2007	888	8.752	74.655	63.114
2008	885	8.254	70.034	62.759

Sumber: Surakarta dalam Angka 2008, BPS Kota Surakarta

Sektor kedua yang terbesar menyerap tenaga kerja adalah sektor bangunan yang mampu menyerap sekitar 44,1% tenaga kerja. Perkembangan sektor ini relatif stabil walaupun juga terjadi penurunan jumlah tenaga kerja karena krisis perekonomian yang sedikit menghambat proses pembangunan di Kota Surakarta.

Dari keempat sektor tersebut, nampak bahwa masyarakat Kota Surakarta sudah mulai meninggalkan sektor pertanian. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2005 hingga tahun 2008, jumlah tenaga kerja yang bekerja di bidang ini mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang mulai beralih fungsi ke sektor perumahan, industri atau bangunan untuk sektor jasa. Kejadian ini merupakan fenomena yang wajar terhadap sebuah kota yang tumbuh besar mejadi kota metropolitan, dimana sektor yang lebih banyak berkembang adalah sektor industri dan jasa.

Kota Surakarta dengan jumlah penduduk secara alamiah lebih dari 500 jiwa secara defakto fisik kota sudah setara dengan kota metropolitan yang memiliki berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, serta memiliki 38 buah pasar besar dan kecil, yang sangat potensial menimbulkan sampah padat dalam jumlah besar. Hal ini terbukti sesuai dengan data yang ada, bahwa produksi sampah rata-rata per hari sebanyak 280 ton yang dalam setahun mencapai 80.493,52 ton. Dari jumlah produksi sampah tersebut tidak semuanya dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hanya 220,53 ton yang dapat terangkut, selebihnya dikelola langsung oleh masyarakat secara tradisional.

Untuk mengelola sampah dari tempat produksi, pengumpul hingga ke TPA menggunakan peralatan atau sarana pengangkut sampah seperti truk, kontainer, gerobak sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak jumlah tenaga kerja hanya diperlukan sebagai tenaga pembersih di tempat produksi sampah, sampai dengan tahun 2007 mencapai 585 orang dapat direkrut untuk bekerja di bidang ini.

### 3.3 *Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan*

Tata ruang Kota Surakarta menyediakan area hijau berupa taman atau hutan kota sebagai paru-paru kota dengan luas 3,45 Ha. Luas taman ini jika dibandingkan dengan luas total Kota Surakarta yaitu 44,04 Ha hanya sebesar 0,0078%. Dengan nilai persentase ini terlihat sangat kecil, karena itu tentunya dengan kecilnya lahan hutan kota perlu kesadaran oleh masyarakat kota untuk berpartisipasi membantu menghijaukan kota dengan cara menanam pohon besar atau keras di halaman rumah, di kantor maupun di tempat usaha.

**Tabel 3.3**  
**Tata Ruang Penggunaan Tanah di Wilayah Surakarta Tahun 2005-2009**  
**(dalam Ha)**

Tata Ruang	2005	2006	2007	2008	2009
Luas kawasan pemukiman	2.707,30	2.716,59	2.731,02	2.157,85	2.171,42
Luas kawasan Industri	101,42	160,60	160,60	215,350	238,42
Luas kawasan kumuh perkotaan	104,46	101,42	101,42		
Luas lahan produktif	149,55	253,04	257,04		

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

Penggunaan lahan lainnya juga mengalami perubahan. Untuk lahan produksi naik dari 149,55 Ha pada tahun 2005 menjadi 257 Ha pada tahun 2007, disisi lain lahan perumahan turun dari 2.707,3 Ha di tahun 2005 menjadi 2.171,42 Ha di tahun 2009. Kondisi ini dimungkinkan karena laih fungsi peruntukan dari rumah untuk penghuni berubah menjadi industri rumah tangga dan usaha lainnya, sehingga petugas mengelompokkan ke dalam kawasan industri dan kawasan bisnis.

Kasus pencemaran di Kota Surakarta perlu mendapat perhatian yang serius karena setiap tahun mengalami kenaikan kasus. Jika pada tahun 2005 terjadi 16 kasus (4 kasus pencemaran tanah, 2 pencemaran air dan 10 kasus pencemaran udara), dan pada tahun 2009 berkurang menjadi 4 kasus (1 kasus pencemaran air dan 3 kasus pencemaran udara).

Data dan penilaian yang dilakukan Dinas Tata Ruang bersama PDAM Surakarta, menetapkan bahwa terdapat 4 kelurahan yang memiliki prioritas perbaikan pemukiman dikarenakan banyaknya warga yang memiliki rumah tidak layak huni. Keempat kelurahan ini antara lain adalah Kelurahan Tipes, Panularan, Pajang dan Bumi. Kriteria wilayah kumuh yang digunakan pada penilaian adalah tingkat kemiskinan penduduk yang dilihat dari segi pendapatan, tingkat kepadatan penduduk dan ada tidaknya sarana air bersih seperti PDAM.

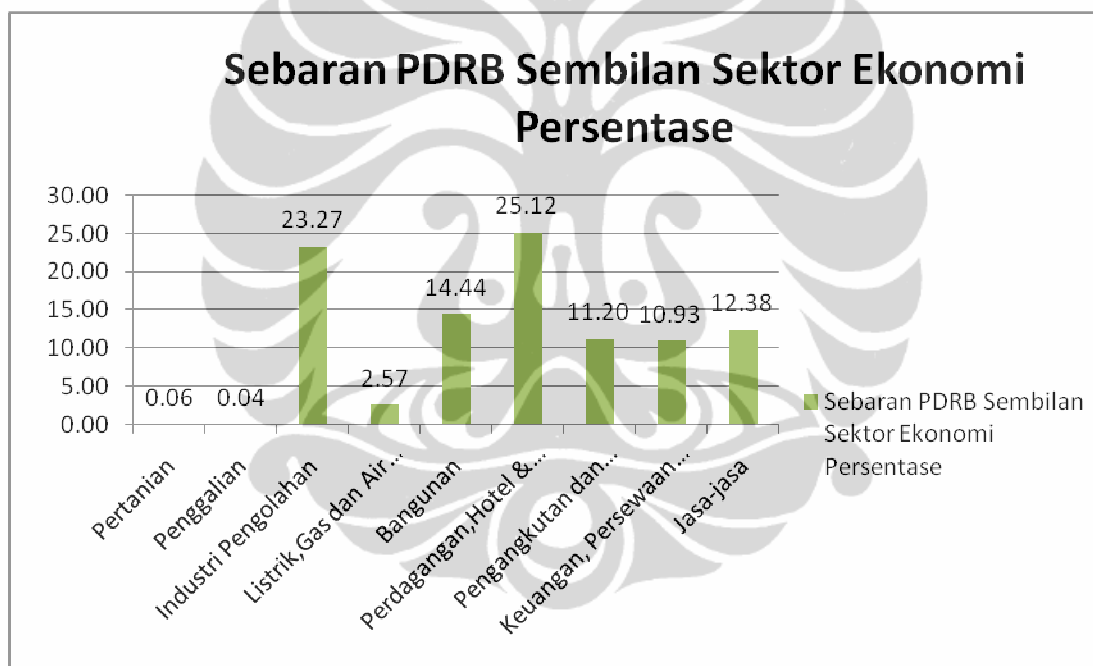
Meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan penduduk akan fasilitas pelayanan masyarakat memacu kesadaran masyarakat juga untuk mulai melihat kualitas lingkungan hidup atas prasaran publik yang tersedia baik oleh pemerintah maupun swasta. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemantauan kualitas lingkungan disekitar tempat hidupnya melalui AMDAL yang dikeluarkan oleh setiap pemrakarsa untuk mendapatkan ijin melakukan usaha atau pembangunan kawasan, disamping itu juga dengan memperhatikan status lingkungan hidup daerah yang merupakan laporan pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup mengenai kondisi mutu lingkungan di suatu daerah.

Dalam pengalihan fungsi lahan, masyarakat juga dituntut berperan serta untuk mengendalikan kualitas lingkungan hidup. Jadi jika terdapat pembangunan kawasan baru, perlu didengarkan pendapat masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek tersebut dan dampak apa yang akan mereka dapatkan dari hasil pembangunan tersebut khususnya bagi lingkungan. Jika terdapat dampak yang dapat meresahkan masyarakat di kemudian hari, mereka dapat menanggulunginya terlebih dulu dengan adanya AMDAL, ataupun kalau sudah terjadi dapat menyelesaikannya secara peradilan.

### 3.4. *Ekonomi dan Keuangan*

#### 3.4.1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Perkapita Tahun 2008

Pada tahun 2008, kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB tidak merata. Sektor industri perdagangan, hotel dan restoran terlihat sebagai sektor yang paling besar memberikan nilai tambah terhadap ekonomi daerah Kota Surakarta. Kontribusi sektor ini mencapai 25,12%. Urutan kedua sebagai sektor yang memberikan kontribusi nilai tambah bagi ekonomi Surakarta adalah sektor industri pengolahan sebesar 23,27%, sektor bangunan 14,44%, dan sektor jasa-jasa lainnya memberikan nilai tambah sebesar 12,38%.



**Gambar 3.4.1 Sebaran PDRB Sembilan Sektor Ekonomi Tahun 2008 (dalam %)**

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Pendapatan nasional atau regional dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional dan regional, khususnya di bidang ekonomi.



Nilai pendapatan nasional atau regional juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat atau daerah, maupun pihak swasta. Walaupun PDRB atas dasar harga berlaku dapat dijadikan salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, namun alat ini masih bersifat kasar.

Jumlah penduduk merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan kapasitas pendapatan perkapita. Untuk mengetahui pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku dapat dihitung dari pembagian PDRB harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk.

**Tabel 3.4.1.**  
**Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2005-2009**

<b>Keterangan</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	5.838.032	6.373.563	6.909.094	7.901.886	
Jumlah penduduk (orang)	558.585	561.507	562.565	563.262	519.968
PDRB perkapita (Rp)	10.451.467	11.350.818	12.281.416	14.028.793	

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

Jika dilihat dari data diatas, pendapatan masyarakat Kota Surakarta naik dari Rp 10,45 juta / tahun pada tahun 2005 menjadi Rp 14 juta / tahun pada tahun 2008.

### **3.4.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan data tahun 2005 sampai dengan 2009 komponen pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Untuk data bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan terjadi pergerakan yang fluktuatif sesuai dengan kondisi di tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2006 bagian laba usaha daerah mengalami penurunan, sedangkan lain-lain pendapatan tahun 2008 mengalami penurunan.

**Tabel 3.4.2.1**  
**Pertumbuhan komponen PAD dan kontribusinya Tahun 2005-2009**  
**(Juta Rp)**

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	Kontribusi (%)
1. Total PAD	62.602	74.709	88.034	96.199	110.842	
a. Pajak Daerah	28.264	34.490	39.465	45.781	51.463	46.43
b. Retribusi Daerah	28.652	32.206	33.969	35.575	41.206	37.18
c. Bagian Laba Usaha Daerah	4.991	3.369	3.587	4.393	3.282	2.96
d. Lain-lain Pendapatan	693	4.643	11.011	10.449	14.890	13.43
2. Rasio PAD terhadap APBD	17,68	15,39	14,87	13,71	14	

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

Jika dilihat dari kontribusi, maka pajak daerah masih memberikan kontribusi terbesar berkisar 46% lalu diikuti dengan retribusi daerah sebesar 37%. Untuk mengukur ketergantungan anggaran belanja daerah (kemandirian anggaran) terhadap dana dari pemerintah pusat atau propinsi, dapat dilihat dari rasio PAD terhadap APBD tahun 2009 sebesar 14% tentunya ini masih tergolong rendah karena lebih dari 85% anggaran belanja masih ditopang dari data pemerintah pusat dan propinsi. Jika dilihat perkembangan rasio ketergantungan, setiap tahun rasio mengalami penurunan atau dengan kata lain terjadi ketergantungan semakin membesar setiap tahunnya. Jika tahun 2005 rasio PAD terhadap APBD sebesar 17,68%, maka tahun 2006 nilai rasio 15,39%, tahun 2007 nilai rasio 14,87% dan tahun 2008 nilai rasio 13,71%. Untuk tahun 2009 diperkirakan ada perbaikan rasio akibat peningkatan PAD yang signifikan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan amanat dari rakyat untuk mengelola uang yang dikumpulkan dari rakyat (seperti pajak dan retribusi) dan digunakan untuk pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat ( Pasal 23 UUD 1945 hasil amandemen ke 4). Karena itu perlu dicermati adalah adanya upaya untuk memprioritaskan anggaran untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Kegiatan ini berupa pembangunan di sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Yang perlu dicermati dalam analisis

anggaran belanja adalah peruntukkan dan realisasi anggaran belanja yang menunjukkan kualitas pelaksanaan pembangunan oleh aparat pemerintah daerah.

**Tabel 3.4.2.2**  
**Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005-2009 (Rp)**

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009
Rencana Belanja	356.646.628.715	512.928.226.616	656.247.692.050	854.690.595.842	869.969.523.040
Realisasi Belanja	340.095.169.168	470.560.732.279	588.297.504.607	760.080.852.467	461.014.791.692
Realisasi/Rencana (%)	95,36	95,36	91,74	88,93	52,99

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

### 3.5. *Industri dan Perdagangan*

#### 3.5.1 **Industri**

Sektor industri cukup berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : industri besar, industri sedang, industri kecil dan rumah tangga. Menurut jumlahnya, industri kecil pada tahun 2008 terdapat 1225 unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 26 ribu lebih tenaga kerja. Sedangkan industri sedang/menengah jumlahnya tidak banyak, kurang lebih 115 unit dan mampu menyerap tenaga kerja 7.038 orang. Sektor industri besar, walaupun jumlahnya tidak banyak yaitu 48 unit tetapi mampu menyerap tenaga kerja hingga 13 ribu tenaga kerja. Jadi jika dilihat dari keterangan diatas, terbukti bahwa banyak industri besar yang mampu menyerap tenaga kerja warga kota Surakarta dan sekitarnya.



**Gambar 3.5.1 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja oleh Industri Kecil, Menengah, dan Besar Tahun 2005-2009**

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan jumlah unit usaha yang signifikan. Jumlah industri kecil tahun 2009 jumlahnya turun menjadi 104 dengan daya serap tenaga kerja 659 orang. Begitu juga pada industri menengah turun menjadi 13 unit, dan industri besar turun dari 48 unit usaha menjadi 12 unit usaha di tahun 2009, dengan hanya menyerap tenaga kerja 738 orang. Semua fenomena ini akibat dari krisis ekonomi global yang dimulai dengan krisis harga minyak yang terlalu cepat naik lalu mengakibatkan menurunnya semua permintaan akan barang-barang industri olahan, khususnya permintaan produk industri ekspor banyak terjadi pembatalan permintaan.

Meskipun demikian, pembangunan kawasan industri di wilayah Surakarta tetap dikembangkan dengan adanya pembangunan *Solo Tecno Park* dan pembangunan kembali kawasan industri batik Kauman. Pelaksanaan pembangunan kawasan industri baru ini terkait dengan perencanaan pengembangan kota Surakarta dalam bidang pengembangan sumber daya yang telah dimiliki yaitu berupa sumber daya manusia dan potensi perdagangan batik. Pembangunan kawasan industri baru ini, merupakan salah satu usaha pemerintah kota Surakarta untuk menyelamatkan lingkungan dari pembangunan kawasan industri sebelumnya yang belum menerapkan pengelolaan dampak lingkungan.

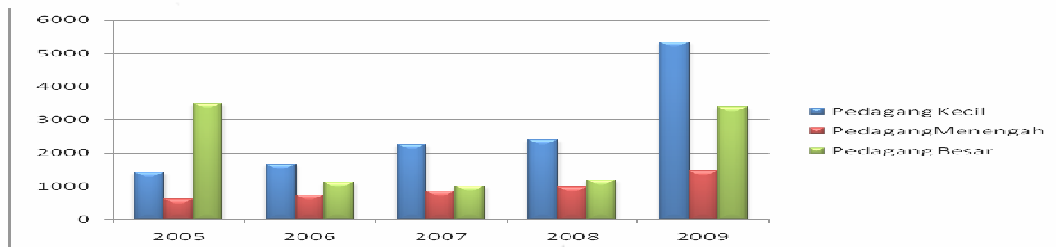
### **3.5.2 Perdagangan**

Untuk bidang ekonomi masyarakat Surakarta selain mengandalkan bidang industri juga mengandalkan sektor perdagangan. Jumlah unit usaha perdagangan yang ada di kota Batik ini relatif banyak berkisar 1500 unit usaha.

Sejak terjadi kontraksi yang sangat signifikan terhadap jumlah pedagang akibat krisis ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga BBM, perlahan namun pasti perkembangan potensi perdagangan di Kota Surakarta dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup baik sampai dengan tahun 2009.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Surakarta dan unit usaha perdagangan dari tahun 2005 hingga 2009, penyerapan tenaga kerja baik

pedagang kecil, menengah maupun besar setiap tahun mengalami pertumbuhan yang menggembirakan.



**Gambar 3.5.2 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja oleh Pedagang Kecil, Menengah dan Besar Tahun 2005-2009**

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

**Tabel 3.5.2.**

**Jumlah Industri dan Perdagangan Kecil, Menengah, Besar Tahun 2005-2009**

Industri & Perdagangan	2005	2006	2007	2008	2009	Satuan
<b>1. INDUSTRI</b>						
<b>a. Industri Kecil</b>						
1). Unit Usaha	975	1.061	1.143	1.225	104	Unit
2). Tenaga Kerja	22.064	24.954	25.482	26.167	659	Orang
3). Nilai Produksi	4.234.729	4.239.889	4.377.158	4.388.536		Jt Rp
4). Nilai Investasi		10.608				Jt Rp
<b>b. Industri Besar</b>						
1). Unit Usaha	25	41	45	48	12	Unit
2). Tenaga Kerja	4.799	10.608	13.272	13.388	738	Orang
3). Nilai Produksi	771.014	1.017.089	1.017.089	-	-	Jt Rp
4). Nilai Investasi			618			Jt Rp
<b>c. Industri Menengah</b>						
1). Unit Usaha	80	85	102	115	13	Unit
2). Tenaga Kerja	10.572	7.560	7.770	7.938	253.004	Orang
3). Nilai Produksi	1.204.199	1.127.798	1.148.724			Jt Rp
<b>2. PERDAGANGAN</b>						
<b>a. Perusahaan Kecil</b>						
1). Unit Usaha	762	943	1.144	1.179	1.171	Unit
2). Tenaga Kerja	1.422	1650	2.250	2.400	5.343	Orang
<b>b. Perusahaan Menengah</b>						
1). Unit Usaha	88	143	149	176	179	Unit
2). Tenaga Kerja	611	745	855	975	1.460	Orang
<b>c. Perusahaan Besar</b>						
1). Unit Usaha	11.061	80	74	120	135	Unit
2). Tenaga Kerja	3.496	1	1.010	1.175	3.376	Orang

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

Untuk sarana perdagangan seperti pasar tradisional, pasar grosir dan mal jumlahnya relatif stabil. Sarana perdagangan swalayan mengalami dinamika yang cukup menarik dimana ketika jumlah mal atau plaza meningkat membawa dampak pada keberadaan jumlah swalayan yang mengalami penurunan.

Sedangkan banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang terdata pada tahun 2007 di Kota Surakarta sebanyak 3.834 buah. Data tersebut saat ini tentunya sudah berubah, khususnya jumlah PKL yang terdapat di wilayah Kecamatan Banjarsari dan Pasar Kliwon. PKL di daerah ini telah ditertibkan dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dengan membangun Pasar Klitikan di wilayah Kelurahan Semanggi sebagai tempat pemindahan PKL dari wilayah kelurah Setabelan, Kecamatan Banjarsari dan Pasar Kliwon. Selain itu juga Pemkot telah membangun Pasar Ngarsopuro untuk menampung PKL di wilayah Kelurahan Mangkunegaran, serta membuat kawasan wisata makanan di Kelurahan Manahan dan Gladag untuk menampung PKL yang berdagang makanan.

Dengan adanya pembangunan kawasan perdagangan baru tersebut, pengelolaan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan harus lebih ditingkatkan oleh pemerintah. Dengan demikian sampah hasil produksi dari kegiatan usaha tersebut, penggunaan air tanah, air limbah dari usaha perdagangan dapat lebih dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan mengurangi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar kawasan tersebut.

### **3.6 Infrastruktur**

Salah satu hal yang mengindikasikan pesatnya perkembangan Kota Surakarta adalah rendahnya laju pertumbuhan penduduk yang dikarenakan terdesaknya kawasan permukiman di pusat kota yang beralih fungsi untuk kegiatan ekonomi. Beberapa indikator lainnya adalah tumbuhnya beberapa jenis kegiatan dan pusat-pusat lingkungan serta semakin padatnya arus lalu lintas di dalam kota.

Beberapa kecenderungan perkembangan Kota Surakarta menjadi pusat kota bagi daerah *hinterland* disekitarnya adalah :

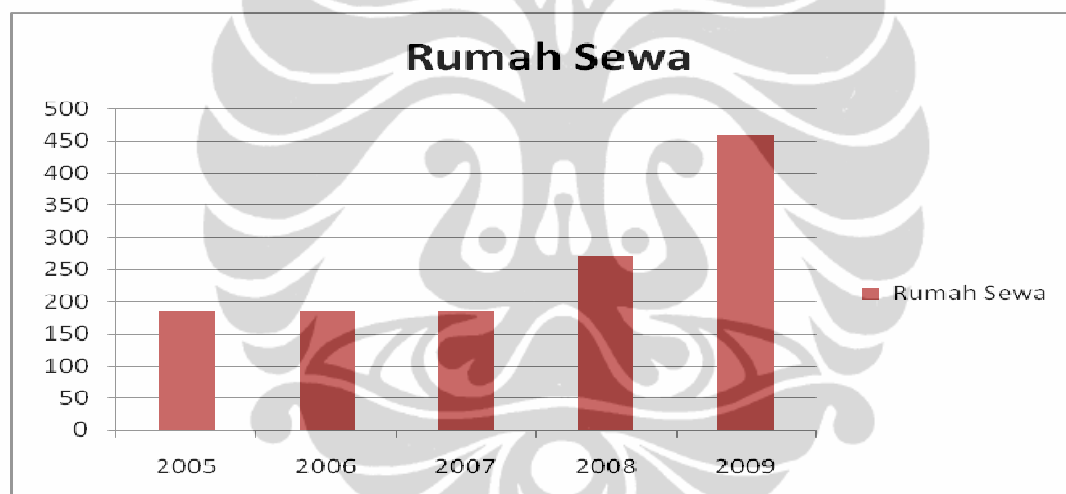
- Perdagangan yang berupa mal, pertokoan dan rumah makan.  
Pertumbuhan kegiatan mal dan pertokoan ini cenderung bersifat intensifikasi ruang di kawasan pusat kota, sedang rumah makan selain bersifat intensifikasi ruang di pusat kota, sebagian juga cenderung berkembang di sekitar jalan akses ke luar kota
- Jasa, meliputi bengkel, hotel, bank  
Kegiatan bengkel memiliki kecenderungan berkembang ke arah pinggiran (khususnya bengkel kecil), sedangkan bengkel besar cenderung di kawasan pusat kota atau pada ruas-ruas jalan utama. Perkembangan bank cenderung di kawasan pusat kota, sedang hotel berbintang cenderung berkembang di kawasan pusat kota dan jalan-jalan utama kota, dan hotel melati cenderung berkembang di sekitar terminal bus Tirtonadi dan stasiun Balapan
- Industri  
Industri besar dan sedang memiliki kecenderungan berkembang ke arah pinggiran bahkan keluar Kota Surakarta, sedang industri kecil sebagian cenderung menyebar dan sebagian mengelompok membentuk sentra industri sesuai dengan karakteristik produksinya.
- Pedagang Kaki Lima (PKL)  
Kegiatan PKL mempunyai kecenderungan tumbuh di setiap penjuru wilayah kota, khususnya di sekita pusat-pusat kegiatan, misalnya di sekitar pasar, rumah sakit, terminal, stadion, perkantoran dan sebagainya.
- Pendidikan Tinggi  
Kegiatan pendidikan tinggi baru cenderung berkembang ke Kota Surakarta bagian utara, hal ini dilandasi adanya ketersediaan lahan serta nilai tanah yang lebih murah.

Kecenderungan perkembangan kegiatan tersebut memanfaatkan ruang kota secara intensifikasi, khususnya yang berada di kawasan Surakarta bagian

selatan, dan ekstensifikasi khususnya yang berada di kawasan Surakarta bagian utara.

### 3.6.1 Perumahan dan Pemukiman

Sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, Surakarta merupakan kota *hinterland* bagi beberapa kabupaten di sekitarnya. Dengan kondisi ini permasalahan yang muncul adalah adanya kebutuhan perumahan sangat tinggi. Untuk mengatasi kebutuhan yang tinggi sedangkan daya tampung atau lahan kosong terbatas, maka Pemerintah Kota telah menyediakan rumah susun sewa. Sedangkan masyarakat juga berpartisipasi dengan menyediakan rumah sewa bagi masyarakat yang belum mampu membeli rumah tetapi bekerja di Kota Surakarta.



**Gambar 3.6.1. Jumlah Rumah Sewa di Kota Surakarta Tahun 2005-2009**

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

### 3.6.2 Jaringan Jalan

Dalam sistem transportasi dan jaringan jalan di Jawa Tengah, Kota Surakarta merupakan simpul pergerakan yang sangat strategis dengan basis pertumbuhan ekonomi di bidang jasa dan industri yang merupakan pertemuan antara jalur pantura dan jalur selatan yang keduanya merupakan jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan arteri primer, yaitu jalur Jakarta-Surabaya dan jalur Bandung-Yogyakarta-Surabaya.



Selain pertemuan 2 buah jalur besar tersebut, dari wilayah hinterland menuju kota dihubungkan dengan jalur jalan provinsi Jawa Tengah yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer, yaitu jalur jalan Wonogiri-Sukoharjo-Surakarta dan jalur Semarang-Purwodadi-Surakarta

Jalur transportasi dan jaringan jalan ini menunjang laju sektor perdagangan karena fungsi utama perhubungan dan transportasi ialah menjamin kelancaran hubungan transportasi yang baik antara pusat-pusat industri dengan daerah penghasil bahan baku dan pusat perdagangan hasil produksi. Tentunya hal ini hanya bisa dicapai jika adanya jaminan kualitas dari infrastruktur jalan, jembatan, terminal, gudang dan sarana transportasi yang baik.

**Tabel 3.6.2.**  
**Profil Sarana Jalan dan Kondisi Jalan Tahun 2005-2009 (Dalam Km)**

Keterangan	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
1. Status Jalan					
a. Nasional	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15
b. Propinsi	16,33	16,33	16,33	15	15,48
c. Kabupaten	204,32	204,32	204,32	204,32	204,32
d. Desa/Lokal	471,54	471,54	471,54	471,54	472,34
e. Tol	-	-	-	-	-
2. Kondisi Jalan					
a. Aspal	467,5	467,93	468,73	469,03	469,03
b. Berbatu	97,55	97,55	97,55	97,55	97,55
c. Kerikil	1,8	1,37	0,57	0	1,07
d. Tanah		0,234	0,234		
3. Jembatan					
a. Panjang	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234
b. Jumlah (buah)	20	20	20	20	20

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kota Surakarta 2009, Bappeda Kota Surakarta

Jika dilihat dari panjang jalan maka sejak tahun 2005 hingga 2009 panjang jalan di Kota Surakarta tidak mengalami perubahan atau penambahan. Jalan Propinsi dibuat berdasarkan SK Menteri PU (terakhir Kep.Men.PU/376/KPTS/M/2004) dimana dari tahun 2005 sampai dengan 2009 relatif tidak ada perubahan panjang jalan yaitu Jalan Nasional sejauh 13,15 km dan jalan Propinsi sejauh 16,33 km. Berdasarkan SK Mendagri (terakhir SK Mendagri Otda No.55/2000), maka panjang jalan kabupaten juga tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 204,32 km. Untuk penambahan jalan nasional, propinsi maupun kabupaten, Pemerintah Kota Surakarta menunggu perubahan SK Menteri PU atau Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan untuk kondisi jalan dari tahun 2005 sampai tahun 2009 untuk jalan yang diaspal mengalami pertumbuhan. Dipihak lain panjang jalan berbatu dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal ini menandakan adanya peningkatan kualitas jalan dari jalan berbatu menjadi kualitas jalan aspal. Sistem jalan yang dikembangkan oleh Pemkot Surakarta ini menjadi pedoman pola jaringan drainase yang dikembangkan untuk mencegah genangan air dan banjir di Surakarta bagian selatan yang mempunyai tingkat kelerengan yang relatif landai.

### **3.6.3 Air Bersih**

Jaringan air bersih di Kota Surakarta dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta, dengan mengambil sumber air baku dari sumber mata air Cokro Tulung Kabupaten Klaten dan beberapa titik sumur dalam di wilayah Kota Surakarta. Karena keterbatasan sumber air baku, jaringan air bersih ini belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Kota Surakarta. Berdasarkan data tahun 2007, jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kota Surakarta sebanyak 52.776 pelanggan dengan jumlah volume air terjual sebesar 1.232.183 M<sup>3</sup>.

Jumlah pelanggan paling banyak adalah pelanggan rumah tangga, yaitu sebanyak 45.814 pelanggan, dan pelanggan kecil adalah pelanggan dari instansi pemerintah, yaitu sebanyak 244 pelanggan.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga masyarakat, pemerintah bersama PDAM bekerja sama dengan melakukan kegiatan penyelamatan lingkungan dengan cara peningkatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air, rehabilitasi hutan dan lahan, serta peningkatan peran serta masyarakat dlm rehabilitasi & pemulihan cadangan sumber daya air. Selain itu juga dikembangkan jaringan perpipaan dengan target pelayanan hingga tahun 2016 sebesar 75%. Sumber baku adalah dengan menggunakan sumber mata air dan air tanah dalam dipompa ke *water tower*, yang selanjutnya didistribusikan dengan sistem grafitasi.

#### **3.6.4 Persampahan**

Sistem pembuangan sampah di wilayah Kota Surakarta sampai saat ini, sebagian besar sudah dikelola secara sistematis, yaitu dikumpulkan secara berjenjang dari tempat produksi hingga tempat pembuangan akhir. Pengelolaan sampah dilakukan mulai dari tong sampah dirumah-rumah hingga TPS dengan target pengelolaan sebesar 75%. Sedangkan sisanya dikelola secara tradisional terarah, yaitu dengan sistem ditimbun pada pekarangan masing-masing, sehingga dalam jangka panjang sekaligus dapat berfungsi sebagai humus yang menyuburkan tanah pekarangan.

Untuk mengelola meningkatnya volume sampah di Kota Surakarta pada masa mendatang, maka diperlukan adanya perhitungan dan penganalisaan kebutuhan sarana pengangkutan maupun sistem pembuangan sampah yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi di wilayahnya.

#### **3.6.5 Drainase**

Sistem drainase Kota Surakarta sudah dikembangkan sejak jaman penjajahan Belanda dengan memanfaatkan beberapa sungai alam yang ada, yaitu Bengawan Solo (sebagai aliran akhir), Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Pepe dan Kali Pelemwulung yang semuanya bermuara ke Bengawan Solo.

Sistem drainase tersebut terutama untuk mengatasi drainase Kota Surakarta bagian selatan yang memiliki kelerengan lahan relatif landai, sedangkan

bagian utara memiliki ketinggian cukup menguntungkan dan kelerengan lahan rata-rata diatas 15% relatif lebih mudah penanganannya.

Dalam menciptakan sarana dan prasarana drainase yang dapat menampung seluruh kebutuhan masyarakat kota Surakarta, pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk menjaga sistem drainase yang sudah ada dengan revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan bantaran sungai melalui kegiatan penanaman pohon penghijauan/tanaman pelindung, peningkatan konservasi daerah tangkapan air melalui pembangunan taman hijau di bantaran sungai Kali Anyar Kec. Jebres, menciptakan *urban forest* di bantaran sungai Bengawan Solo. Namun pelaksanaan ini masih menemui hambatan antara lain masih adanya hunian penduduk di area RTH, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap lingkungan bantaran sungai, kurangnya pemerintah dalam menjaga tanaman lindung.

Sebagai rencana kebijakan di masa datang, sistem drainase akan memanfaatkan jaringan sungai dan jaringan drainase utama yang ada, yang berperan sebagai *main drain* (drainase induk). Pola jaringan drainase yang dikembangkan mengikuti pola jaringan jalan yang dikembangkan.

### **3.7 Rencana Strategi Pembangunan Tata Ruang Kota Surakarta**

Pembangunan perkotaan yang terus berlangsung selama ini berdampak juga pada terjadinya permasalahan yang diakibatkan oleh perkembangan yang kurang terkendali sehingga terjadi perkembangan secara alami yang sarat dengan konflik antar kepentingan kegiatan sosial ekonomi.

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul serta untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung perlu dilakukan perencanaan tata ruang yang mencakup berbagai aspek, sehingga rumusan tata ruang kota tersebut mengikat semua pihak dan dapat mengatur dan mengendalikan perkembangan kota sesuai fungsi kota sebagai wadah kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Surakarta Tahun 1993-2013 terdapat tujuan dan sasaran penataan kawasan perkotaan supaya kehidupan dan penghidupan warga kota yang bersangkutan menjadi aman, tertib, lancar dan sehat. Tujuan dan sasaran RUTRK Kota Surakarta adalah:

- Meningkatkan kualitas lingkungan wilayah perencanaan kota Surakarta melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan
- Memberikan pedoman pembangunan kota secara jelas melalui arah pembangunan dan penataan ruang
- Memberikan keputusan hukum bagi para pelaku pembangunan

Untuk merumuskan rencana penataan ruang, maka dibuat kebijakan yang bersifat makro sebagai dasar dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Dasar-dasar yang dimaksud mencakup beberapa aspek strategis dan dominan dari segi tata ruang kota.

Dasar perumusan visi tata ruang Kota Surakarta adalah tidak lepas dari visi Kota Surakarta yang sudah ditetapkan yaitu “BERSERI TANPA KORUPSI” yang bermakna Bersih, Sehat, Rapi, Indah dan tidak ada korupsi. Visi Kota Surakarta adalah :

- Mewujudkan iklim kehidupan kota yang kondusif, aman dan damai
- Mewujudkan pembangunan kota yang adil dan demokratis
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota
- Meningkatkan eksistensi kota dalam tata pergaulan regional, nasional maupun internasional.

Aktualisasi Visi dan Misi Kota Surakarta yang dikaitkan dengan kondisi permasalahan spasial yang semakin kompleks yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, maka visi tata ruang Kota Surakarta akan mempertajam salah satu unsur visi kota yaitu unsur “Sehat”. Visi tersebut adalah “Kota Produksi Bersih” atau “*Cleaner Production City*”, yang dalam dunia ilmu lingkungan identik dengan kota sehat.

Terdapat lima (5) prinsip Kota Produksi Bersih, yaitu: *Rethink*, *Recovery*, *Reuse*, *Recycling* dan *Reduce*. Substansi dari prinsip Kota Produksi Bersih tersebut adalah upaya untuk berpikir, merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*). Untuk menuju kota sehat tersebut, diperlukan Misi sebagai berikut:

- Membentuk pola pergerakan kegiatan kota yang lancar, aman, dan efisien
- Menciptakan penghijauan sebagai paru-paru kota
- Meminimalkan dan mengelola limbah kota menjadi peluang yang bermanfaat
- Mengembalikan dan memanfaatkan fungsi kawasan lindung secara benar
- Menjalin kerjasama lintas wilayah dalam penataan ruang

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran, serta visi dan misi diatas, dalam pengembangan pola pemanfaatan ruang Kota Surakarta yang berupa Kebijakan Umum Pemanfaatan Ruang Kota, menggunakan pola atau konsep yang sesuai karakteristiknya, yaitu dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu

- Konsep *Mix Used Planning* : konsep rencana tata guna tanah yang menetapkan adanya beberapa daerah yang bersifat campuran bagi beberapa jenis kegiatan yang saling menunjang
- Konsep *Flexible Zoning*: konsep tata guna tanah yang memberikan toleransi bercampurnya kegiatan lain pada daerah peruntukkan tertentu, dengan catatan kegiatan lain tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan utama, bahkan saling menunjang.

Kebijakan pemanfaatan tata ruang kota tersebut juga memperhatikan aspek Tata Ruang Kota yang tercantum dalam RUTRK Kota Surakarta yaitu:

- Meningkatkan fungsi dan peranan kota Surakarta dalam ruang lingkup wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar meningkatkan fungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai Kota Pelayanan Nasional

- Menciptakan pola tata ruang dan pola pergerakan yang lancar, aman dan efisien sehingga masing-masing kegiatan dalam kota mempunyai interaksi positif yang saling menguntungkan
- Menciptakan pola tata ruang kota yang serasi dan optimal, serta penyebaran fasilitas dan infrastruktur secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan kota sesuai dengan norma yang berlaku
- Mengoptimalkan potensi-potensi yang ada serta mengeliminasi kendala, sehingga pola tata ruang yang dihasilkan merupakan optimalisasi dari penggunaan ruang yang ada
- Mengendalikan pertumbuhan dan pembangunan Kota Surakarta secara terarah

### **3.8 Rencana Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup**

Dalam penyusunan Rencana Strategik, Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta berpijak pada kondisi dan potensi yang ada di kota Surakarta yang mana merupakan komponen penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan lingkungan di kota Surakarta antara lain :

- Masih kurangnya ruang terbuka hijau.
- Rendahnya kuantitas dan kualitas air tanah.
- Pencemaran udara oleh emisi gas buang dari sumber bergerak (kendaraan) dan tidak bergerak (industri).
- Belum terkoordinasinya penanganan masalah lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo.
- Meningkatnya jumlah sampah komunal dan limbah cair domestik
- Rendahnya kepedulian masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam upaya pengelolaan lingkungan.

Dari kondisi seperti tersebut diatas kemudian ditetapkan rencana strategis yang tertuang didalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kerja.

### 3.8.1 Visi

Guna menghadapi tantangan kedepan yaitu mewujudkan Kota Surakarta yang bersih dan nyaman serta terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka Visi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah :

**“Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat untuk mewujudkan pembangunan Kota Surakarta yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat”.**

### 3.8.2 Misi

Guna menjabarkan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan ditempuh harus bertumpu pada tupoksi dan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Adapun Misi Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah :

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertumpu pada keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana dan terkendali dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan.
3. Peningkatan akses Sistem Informasi Lingkungan (SIL).
4. Peningkatan pengendalian dan pemantauan sumber-sumber pencemaran lingkungan.
5. Penataan dan penambahan vegetasi kota di ruang terbuka hijau.
6. Peningkatan dan pengembangan pelayanan prima dalam rangka penggalian potensi sumber-sumber PAD.

### 3.8.3 Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.



## **b. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan disertai indikator beserta rencana tingkat capaiannya masing-masing.

### **3.8.4 Kebijakan Umum Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta**

Tahun Anggaran 2009, arah dan kebijakan umum APBD Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta diarahkan pada :

1. Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan pengadaan komposter
2. Sosialisasi dalam rangka penilaian Kota Sehat/ Adipura
3. Pengujian kualitas air sungai dan air sumur
4. Penyelesaian kasus-kasus lingkungan
5. Penyusunan dokumen UKL-UPL kawasan Ngarsopuro dan RSUD Kota Surakarta
6. Program padat karya bersih-bersih sungai
7. Penyusunan draf Raperda Pemanfaatan Air Bawah Tanah
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
9. Pengadaan alat bor biopori dan pembuatan sumur resapan
10. Pembangunan taman di bantaran sungai Kalianyar, Kecamatan Jebres
11. Penanaman pohon di lapangan-lapangan, TPU, sekolah dan ruang terbuka lainnya
12. Pembuatan desain urban forest daerah bantaran sungai Bengawan Solo
13. Sosialisasi program Adiwiyata pada para pelajar
14. Penyusunan data status lingkungan hidup Kota Surakarta
15. Pemantauan udara ambien di 12 lokasi jalan
16. Peningkatan pelayanan bidang perijinan HO

### 3.8.5 Strategi dan Prioritas APBD

Strategi dan prioritas APBD tahun 2009 pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta tertuang didalam program dan kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan</li> <li>• Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan</li> </ul>
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura</li> <li>• Pemantauan Kualitas Lingkungan</li> <li>• Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup</li> <li>• Pengkajian dampak lingkungan</li> <li>• Koordinasi pengelolaan Prokasih / Superkasih</li> <li>• Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</li> <li>• Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup</li> </ul>
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air.</li> <li>• Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air</li> </ul>
4.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>• Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA</li> </ul>
5.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan</li> <li>• Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah</li> </ul>
6.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
7.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau [ RTH ]	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau [ RTH ]
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Keuangan Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2009

